

## CONVERGENCE COMMUNICATION MODEL DALAM UPAYA PENGELOLAAN TANAMAN PANGAN DI ACEH BARAT

Ashabul Yamin Asgha<sup>1)</sup>, Saiful Amri<sup>2)</sup>, Uswatun Nisa<sup>3)</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Syiah Kuala, Meulaboh, Indonesia

Corresponding Author: [ashabulyaminasgha@utu.ac.id](mailto:ashabulyaminasgha@utu.ac.id)

### ABSTRACT

*West Aceh is one of the districts in Aceh Province that prioritizes the agricultural sector in food crops. This can be seen from the number of food crop agricultural commodities in West Aceh that number 561 groups or reach 44% of the total number of other commodities. This research aims to describe the communication resource management carried out by the West Aceh district government using a convergence model approach. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques, namely interviews, observation and documentation studies. The informants for this research were 10 people from the West Aceh Food Crops and Horticulture Department, PERHIPTANI, as well as farming communities. The data analysis techniques used are data collection, reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that the communication resource management efforts that have been carried out by the West Aceh Agricultural Food Crops and Horticulture Service as the implementer are to prepare planning programs according to farmers' needs in increasing rice yields, such as by prioritizing farmer group training. Furthermore, by preparing human resources (HR) that are appropriate to their expertise and field of work, this aims to make it easier to achieve goals. Implementation of program development is carried out directly, both with training and outreach aimed at farmer groups, however the involvement and participation of farmer groups is still relatively low.*

*Keywords: Communication Management, Crops, Farming Society, Convergence Communication Model*

### ABSTRAK

*Aceh Barat menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memprioritaskan sektor pertanian pada tanaman pangan, hal itu terlihat dari komoditi pertanian tanaman pangan di Aceh Barat sudah berjumlah 561 kelompok atau mencapai 44% dari jumlah keseluruhan komoditi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen sumber daya komunikasi yang dilakukan pemerintah kabupaten Aceh Barat dengan pendekatan konvergensi model. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Informan penelitian ini berjumlah 10 orang yang berasal dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat, PERHIPTANI, serta masyarakat tani. Teknik Analisa data yang digunakan adalah koleksi data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan upaya manajemen sumber daya komunikasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat selaku implementor adalah merumuskan perencanaan program sesuai dengan kebutuhan petani dalam meningkatkan hasil panen tanaman padi, seperti dengan memprioritaskan pada pelatihan-pelatihan kelompok tani. Selanjutnya dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan keahlian dan bidang kerja, hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam pencapaian tujuan. Implementasi program pengembangan dilakukan secara langsung, baik dengan pelatihan maupun sosialisasi yang diperuntukkan pada kelompok tani, namun keterlibatan dan partisipasi kelompok tani masih tergolong rendah.*

*Kata Kunci: Manajemen Komunikasi, Tanaman Pangan, Masyarakat Tani, Convergence Communication Model*

## PENDAHULUAN

Sektor pertanian memegang peranan penting dalam kehidupan, terutama dalam pembangunan dan perekonomian Indonesia. Sebagai negara agraris, sektor pertanian dapat melestarikan sumber daya alam, mengamankan kehidupan dan penghidupan serta menciptakan lapangan kerja (Devi, 2015). Namun, dalam pelaksanaannya, menghadapi tantangan baru dan peluang. Tantangan-tantangan baru ini meliputi sejumlah besar isu, di antaranya adalah globalisasi pangan pasar yang mengintensifkan persaingan di sektor pertanian, produktivitas dan daya saing pertanian skala kecil, kenaikan harga produsen dan input, perubahan iklim, dan lain-lain.

Dalam konteks ini, intervensi yang efektif dalam pertanian sangat penting untuk memenuhi peran vitalnya yaitu menjaga stabilitas ekonomi dan sosial serta menyediakan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan bagi setiap daerah, termasuk Provinsi Aceh. Dengan luas 5.677.081 hektar, Provinsi Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang kaya yang terdiri dari sumber daya hutan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan (dpr.go.id, 2022). Salah satu daerah di provinsi Aceh yang masyarakatnya menitifokuskan mata pencaharian di sektor pertanian khususnya tanaman pangan adalah Kabupaten Aceh Barat. Hal ini berdampak pada semakin banyaknya kelompok-kelompok tani yang dibentuk untuk mengakomodir pengembangan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Aceh Barat, seperti yang terlihat pada tabel dibawah:

Tabel 1. Jumlah Kelompok Tani Berdasarkan Komoditi/Sub Sektor di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022

No	KOMODITI / SUB SEKTOR	KECAMATAN (KELOMPOK TANI)												Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Tanaman Pangan	61	34	20	98	36	75	34	29	34	71	28	41	561
2	Hortikultura	20	11	18	18	24	8	6	3	9	35	3	15	172
3	Perkebunan	16	10	0	12	2	7	6	0	14	53	5	16	141
4	Peternakan	5	1	1	11	0	5	2	1	9	49	2	12	98
5	Belum Diketahui	20	20	1	26	20	30	15	65	3	40	53	2	295
6	Jumlah Poktan	86	65	37	132	81	107	51	94	41	121	87	44	946

Keterangan :  
 1. Arongan Lambalek  
 2. Bubon  
 3. Johan Pahlawan  
 4. Kaway XVI  
 5. Meureubo  
 6. Pantai Ceuremen  
 7. Pantou Reu  
 8. Samatiga  
 9. Sungai Mas  
 10. Woyla  
 11. Woyla Barat  
 12. Woyla Timur



Sumber: dptph.acehbaratkab.go.id, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dideskripsikan bahwa tanaman pangan masih menjadi prioritas komoditi pertanian di Aceh Barat mencapai 44% dari jumlah keseluruhan komoditi. jenis tanaman pangan yang paling banyak ditanam adalah padi, hal itu dikarenakan tingginya angka konsumsi masyarakat Indonesia termasuk Aceh terhadap bahan baku sehingga membutuhkan produksi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup (Gunawan., & Haryanto, 2020). Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian Tahun 2022, Indonesia saat ini menjadi salah satu negara tertinggi dalam memproduksi beras dibandingkan dengan produksi pangan lainnya seperti jagung, kacang hijau, kacang tanah, kedelai, dan ubi jalar (pertanian.go.id, 2022). Kesempatan itu juga dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Barat dalam produktivitas beras yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis tanaman pangan lainnya.

Saat ini, keberlangsungan sektor pertanian pangan di Aceh Barat menghadapi ancaman serius yaitu luas lahan pertanian yang terus menyusut akibat masifnya alih fungsi lahan pertanian produktif ke peruntukan nonpertanian, hal tersebut tentu berdampak pada ketahanan pangan daerah. Belum tersedianya aturan tentang penetapan lahan pertanian yang bertujuan untuk melindungi keseluruhan area lahan pangan menjadi celah bagi masyarakat untuk praktik alih fungsi lahan, hal ini disampaikan oleh Bupati Aceh Barat dalam Sosialisasi dan Pemantapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), mengatakan bahwa salah satu ancaman besar terhadap ketahanan pangan adalah adanya alih fungsi lahan pertanian. Untuk mengatasi hal itu, petani membutuhkan dukungan dari pemerintah agar petani memiliki semangat yang tinggi untuk melakukan kegiatan pertanian di lahan pertanian pangan (dptph.acehbaratkab.go.id, 2022).

Sebagai salah satu upaya dalam menangani hal tersebut adalah dengan melakukan penyuluhan kepada petani terkait hal-hal yang dibutuhkan baik dari segi informasi maupun pemberian alat-alat untuk mobilisasi aktivitas pertanian. penyuluhan pertanian dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran bagi pelaku kegiatan pertanian dan petani untuk siap dan dapat saling membantu dalam akses ke informasi pasar, teknologi, modal dan sarana lain untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi bisnis, pendapatan, kesejahteraan dan kesadaran mempertahankan fungsi lahan. Dalam kegiatan penyuluhan, komunikasi yang efektif menjadi penting agar proses penyampaian informasi dapat diterima oleh petani sehingga mendapatkan *feedback* sesuai dengan yang diharapkan oleh pelaku penyuluhan (Alemu, et.al., 2016). Penyuluhan komunikasi pertanian adalah proses penyampaian informasi dan pengetahuan kepada petani untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dan meningkatkan produktivitas pertanian (Leeuwis, C. 2004)

Penyuluhan yang dilaksanakan selama ini masih sebatas sosialisasi, dan bersifat satu arah. Masyarakat petani melibatkan diri hanya sebagai penerima pesan, bukan menjadi bagian dari penentu program kebutuhan yang urgen yang inisiasinya berasal dari pemerintah atau bersifat *top-down* bukan *bottom-up*. Sehingga, penelitian ini menjadi penting untuk dikaji untuk mendeskripsikan bagaimana manajemen sumberdaya komunikasi yang dilakukan oleh dinas terkait dan penyuluh pertanian, serta berupaya mengkaji lebih dalam bagaimana keterlibatan atau partisipasi masyarakat tani dalam pelaksanaan program yang aplikatif. penelitian ini dikaji menggunakan pendekatan *convergence model of communication*, yang berupaya mendeskripsikan manajemen komunikasi yang bersifat interaktif dan berfokus pada hubungan timbal balik antara pemerintah, penyuluh pertanian dan masyarakat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam pelaksanaan kegiatan membutuhkan manajemen sebagai pondasi dalam menentukan dan merancang program sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang ditargetkan. Manajemen dipahami sebagai proses pengelolaan atau pengaturan yang biasanya dimulai dari tahap perencanaan sampai evaluasi untuk menilai tingkat keberhasilan sebuah kegiatan atau program yang dilaksanakan, baik secara individu maupun kelompok (Adib., & Orji, 2021). Dalam pelaksanaannya, kerap kali membutuhkan sumber daya manusia dalam berkomunikasi atau bernegosiasi antar pelaku dalam sebuah kegiatan untuk mencapai kesepakatan bersama.

Sumber daya komunikasi meliputi: tenaga, anggaran, sarana dan prasarana, pesan/informasi, dan media komunikasi sebagai saluran penyampaian pesan, dan media komunikasi. Sumberdaya manusia yang mencakup dalam proses ini adalah mereka yang mampu mendesain strategi komunikasi, pengemasan pesan komunikasi, komunikator serta komunikan sebagai orang yang menerima informasi tersebut (Darmin, et.al, 2016). Sumber daya manusia komunikasi dituntut mempunyai kompetensi yang mumpuni dalam komunikasi, kreatif dalam pengemasan dan penyaluran pesan, terampil dalam pemanfaatan media yang akan digunakan, mampu menganalisis khalayak yang menjadi target sasaran komunikasi, serta mampu menopang sumber daya lain untuk mencapai tingkat komunikasi yang efektif. Manajemen yang baik terkait sumber daya komunikasi memiliki peran penting untuk menjadikan program dapat berjalan sesuai dengan harapan implementator maupun target sasaran (Peter Boxal, 2017).

Dalam konteks pertanian, sumber daya komunikasi manusia dapat berupa penyuluh yang diberikan kewenangan dalam regulasi untuk menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan pertanian kepada publik yang menjadi sasaran kegiatan atau program yang dijalankan oleh

pemerintah. Pengelolaan informasi yang dimulai dari perencanaan, organizing, actuating, controlling dan evaluating menjadi sebuah proses yang harus dilalui agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal. Sumberdaya komunikasi haruslah orang yang memiliki tingkat kredibilitas yang baik (*source credibility*), menguasai pembedaan yang menjadi substansi yang akan disampaikan kepada masyarakat, serta harus mampu membangun kedekatan emosional (*source attractiveness*) dengan target sasaran sehingga tujuan komunikasi dapat dicapai dengan maksimal.

### 2.2.2 Convergence Model of Communication

*Convergence model of communication* atau model konvergensi komunikasi merupakan suatu proses yang memusatkan pada informasi atau hal-hal yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang aktivitas berkomunikasi baik komunikator (pemberi pesan) maupun komunikan (penerima pesan) dalam rangka menghasilkan kesepakatan (konsensus) (Bernadette, et al., 2020). Model konvergensi ini merupakan model yang diprakarsai oleh Kincaid (1979). Pendekatan dengan model ini memungkinkan terjadinya *interface* antar pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun indikator dalam model konvergensi ini diantaranya:

1. *Information* : adanya informasi yang disiapkan sebagai bahan dalam melakukan penyuluhan. Informasi tersebut biasanya memfokuskan pada kebutuhan dari masyarakat termasuk memperhatikan kepada siapa informasi itu disampaikan, serta dengan menggunakan media apa sehingga pesan efektif.
2. *Uncertainty* : adanya ketidakpastian terhadap hal-hal yang tidak dapat diprediksi, sehingga diperlukan pemetaan untuk menghindari atau mengurangi resiko yang mungkin akan dihadapi oleh para petani.
3. *Convergence* : menyangkut dengan pemusatan kepentingan. Dalam hal ini penyuluh akan mempertimbangkan kelompok prioritas yang menjadi fokus utama sebuah program maupun pemberdayaan (Jenkins, 2006).
4. *Respect* : terciptanya rasa saling mengerti, saling memahami dan saling menghargai antara pemberi pesan (pemerintah dan penyuluh) dengan penerima pesan (masyarakat tani), menciptakan ikatan emosional sehingga memudahkan dalam upaya pengembangan dari setiap kegiatan.
5. *Mutual Agreement* : adanya kesamaan tujuan sehingga akan meningkatkan performa yang baik dari penyuluh dan semangat yang tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap program pengembangan yang diadakan.

6. *Collective Action* : secara bersama-sama mengimplementasikan setiap wacana yang telah ditetapkan
7. *Network of Relationship* : berupaya menciptakan hubungan sosial yang baik antara penyuluh dengan masyarakat, sehingga akan berdampak pada keharmonisan dari proses interaksi yang berlangsung (Monge, et.al., 2003).

Berdasarkan ketujuh indikator di atas, pendekatan model konvergensi komunikasi ini dapat dikatakan bersifat interaktif diantara komunikator dan komunikan sebagai partisipan komunikasi yang bermuara pada saling mengerti, saling memahami, maupun memiliki sudut pandang yang sama terkait dengan kebutuhan informasi yang adaptif (Nurmayasari, 2020).

Model konvergensi komunikasi ini sangat relevan jika diterapkan dalam sektor pertanian. Hal ini dikarenakan, minimnya informasi yang didapatkan oleh para petani terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, teknologi yang memudahkan mobilisasi dalam pertanian dan hal-hal lain yang dianggap penting dalam menunjang peningkatan hasil panen para petani (Resicha, 2016) sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat tani (Bahua, 2018). Pada kondisi ini, masyarakat dapat menjadi partner maupun inisiator dalam program pemerintah sehingga fokus program berorientasi pada kebutuhan para petani bukan hanya sesuatu yang menguntungkan pihak pemerintah saja (Bonye, et.al., 2021). Simbiosis-mutualisme menjadi tujuan akhir dari pelaksanaan program, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan terkait dengan kebijakan-kebijakan maupun hal lain yang berdampak pada rendahnya keterlibatan dan semangat petani dalam menggarap lahan tanaman pangan di wilayah, termasuk dalam kawasan Kabupaten Aceh Barat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus, karena memerlukan analisis data mengenai daerah tertentu, turut pula meliputi kelompok individu hingga peristiwa khusus (Creswell, 2010; Berg, 2001)). Teknik pengumpulan data penelitian ini ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan metode *purposive* (pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu) (Silalahi, 2009), dan dipilih sebanyak 10 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat
2. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat

3. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat
4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
5. PERHIPTANI Kabupaten Aceh Barat
6. Koordinator Penyuluhan
7. Kelompok Tani
8. Keujrun Blang (koordinator sawah) di salah satu gampong Kecamatan Samatiga
9. Petani di di salah satu gampong Kecamatan Samatiga dan Bubon (2 orang)

Analisis data dilakukan dengan empat tahapan berdasarkan perspektif Raco (2010), yaitu koleksi data (mengumpulkan data), reduksi data (dirangkum dan dipisahkan menurut fokus yang telah ditetapkan berupa informasi terpenting), penyajian data (menyajikan data sesuai dengan fokus penelitian), dan verifikasi (penarikan kesimpulan), verifikasi dimaksudkan menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan secara terus menerus sepanjang proses penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Manajemen Sumber Daya Komunikasi Pemerintah menjadi hal penting dalam mencapai tujuan pembangunan tanaman pangan di suatu daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Barat. Sumber daya komunikasi meliputi: tenaga, anggaran, sarana dan prasarana, pesan/informasi, dan media komunikasi sebagai saluran penyampaian pesan. Selanjutnya, sumberdaya manusia yang mencakup dalam proses ini adalah mereka yang mampu mendesain strategi komunikasi, pengemasan pesan komunikasi, komunikator serta komunikan sebagai orang yang menerima informasi tersebut (Darmin, et.al, 2016). Dalam mendeskripsikan sumber daya komunikasi sebagai upaya pembangunan tanaman pangan khususnya padi di Kabupaten Aceh Barat selanjutnya digunakan *Convergence model of communication* atau model konvergensi komunikasi, yaitu suatu proses yang memusatkan pada informasi atau hal-hal yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang aktivitas berkomunikasi baik komunikator (pemberi pesan) maupun komunikan (penerima pesan) dalam rangka menghasilkan kesepakatan (konsensus). Model konvergensi ini merupakan model yang diprakarsai oleh Kincaid (1979). Pendekatan dengan model ini memungkinkan terjadinya *interface* antar pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun indikator dalam model konvergensi ini diantaranya adalah *Information, Uncertainty, Convergence, Respect, Mutual Agreement, Collective Action*, dan *Network of Relationship*.

## **Information**

Information dipahami sebagai sesuatu yang disiapkan sebagai bahan dalam melakukan penyuluhan atau sosialisasi. Informasi tersebut biasanya memfokuskan pada kebutuhan dari masyarakat termasuk memperhatikan kepada siapa informasi itu disampaikan, serta dengan menggunakan media apa sehingga pesan tersebut dapat diterima secara efektif. Semakin maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian diindikasikan dapat mempersempit lahan yang dapat digunakan untuk menanam tanaman pangan khususnya padi di Kabupaten Aceh Barat. Praktik ini menjadi perhatian pemerintah untuk selanjutnya membatasi tindakan tersebut dengan aturan atau regulasi yang diatur terkait dengan pengelolaan lahan pertanian yang hanya digunakan untuk bertani bukan bermukim. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Informan 1, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat. Dalam wawancara, ia menyampaikan:

*“Praktik alih fungsi lahan memang semakin hari semakin marak dilakukan, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena petani menganggap bahwa bertani tidak cukup memberikan penghasilan yang layak dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga terkadang beberapa dari mereka lebih memilih menjual tanah sawah untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang besar sekaligus dalam satu waktu, dan tentu uang itu akan habis dengan sendirinya tanpa dikelola dengan baik. Padahal, sawah yang bisa dimanfaatkan dengan baik justru akan memberikan pemasukan kepada petani secara kontinue. Menyikapi hal itu kita akhirnya membuat regulasi terkait dengan penertiban lahan persawahan sehingga tidak habis karena dipakai untuk bermukim” (wawancara, 08 Agustus 2023).*

Lebih lanjut, dalam wawancaranya informan 2 yang merupakan kabid sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat menyampaikan hal senada, yaitu:

*“Terkadang masyarakat kurang terbekali dengan informasi-informasi penting seputar pertanian, sehingga memilih jalan pintas untuk menjual lahan. Bertani jaman dulu dengan sekarang tentu berbeda, hal itu bisa dilihat dari penggunaan sarana dan prasarana Bertani. Kalau dulu disamping capek, juga menghabiskan dana yang jauh lebih besar. Contoh misalnya sekarang kita sudah punya mesin pemotong padi, itu tidak butuh waktu yang lama, dalam beberapa jam bisa siap, dan anggaran yang dikeluarkan untuk membayar jasa memanen padi menggunakan mobil pemotong pada juga cenderung lebih murah jika dibandingkan dengan mengupah orang, disamping lebih boros, waktu yang dibutuhkan jika itu dilakukan secara manual juga lebih lama. Nah, informasi-informasi seperti itu yang terus kita berikan untuk memberikan pemahaman kepada petani untuk menjadi petani yang cerdas, kita siap untuk memfasilitasi itu, dan itu kita buktikan dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada kelompok tani untuk selanjutnya disampaikan kepada petani yang ada di desa masing-masing. Apalagi kita punya 200an penyuluh yang tersebar di 300an desa di Kabupaten Aceh Barat, dan harapannya itu menjadi kekuatan kita dalam memberikan pemahaman kepada petani untuk tetap mempertahankan lahannya” (wawancara, 14 Agustus 2023).*

Dari dua pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa kurangnya edukasi dan pemahaman petani terkait dengan keuntungan yang dihasilkan dari Bertani menjadikan banyak petani yang mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi non pertanian, baik untuk dijual dan dijadikan pemukiman atau dengan menanam tanaman lain seperti sawit yang diyakini akan memberikan keuntungan yang jauh lebih besar dengan tanaman pangan seperti padi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh informan 8 yang merupakan salah satu petani di kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Dalam wawancara ia menyampaikan:

*“Sawah itu memang tidak memberikan keuntungan yang besar, apalagi kalau harga gabah dibeli dengan harga yang murah, misalnya hanya 5000 per kilo. Kalau dihitung-hitung untungnya sangat sedikit, karena kita kadang harus bayar jasa orang untuk membersihkan rumput sekitaran tanaman pagi, memanen pagi, belum lagi masalah air yang kadang tidak cukup. Bahkan sekali-kali kita bukan untung malah rugi, jadi penuh dengan resiko. Makanya ada beberapa dari kita yang mengalihkan lahan sawah menjadi pemukiman, baik dijual maupun dibangun rumah, kadang juga ada beberapa yang menggunakan lahan itu untuk menanam sawit” (wawancara, 19 Agustus 2023).*

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tani terkait pengelolaan lahan persawahan tidak mampu memberikan keuntungan yang besar bahkan terkadang petani dirugikan karena beberapa hal, seperti harga gabah yang relative rendah dan tidak sesuai jika dibandingkan dengan harga beras, dan kurangnya sarana dan prasarana yang didapatkan sehingga pengelolaan lahan masih banyak yang menggunakan cara manual yang menghabiskan banyak waktu dan upah yang harus dibayarkan kepada orang lain. menyikapi hal ini, maka diperlukan pendekatan secara edukatif dan persuasive dari pemerintah dan penyuluh pertanian dalam memberikan pemahaman baik secara teoritis maupun praktis dengan penggunaan teknologi canggih dalam membantu petani mengefisiensikan waktu dan anggaran.

### ***Uncertainty***

*Uncertainty* dipahami bahwa adanya ketidakpastian terhadap hal-hal yang tidak dapat diprediksi, sehingga diperlukan pemetaan untuk menghindari atau mengurangi resiko yang mungkin akan dihadapi oleh para petani. Dalam upaya meminimalisir alih fungsi lahan pertanian, pemerintah dan penyuluh pertanian harus dapat memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang dapat ditimbulkan jika praktik tersebut tidak dapat memberikan solusi. Sebagai upaya dalam penertiban alih fungsi lahan, pemerintah membuat sebuah aturan yang dituangkan dalam Qanun tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). qanun itu dirancang untuk memberikan batasan pada praktik alih fungsi lahan dan sebagai upaya menjaga lahan

pertanian sawah agar tidak eksis dan tidak tergerus oleh pemukiman, kecuali jika peruntukan lahan tersebut untuk kepentingan umum, seperti membangun mesjid atau fasilitas umum lainnya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Informan 4 yaitu Kabid Tanaman Pangan, dalam wawancara ia menyampaikan:

*“Secara regulasi kita sudah menyusun, dan itu masih rancangan, terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). saat ini, Luas baku sawah Aceh Barat dari 10.153 mnjadi 9.775 hektar, jadi berkurang 300an hektar. Makanya kita buat sebuah aturan yaitu qanun untuk menertibkan itu, jadi apabila ada alih fungsi lahan akan ada sanksi hukum. Dari baku sawah 9.775 hektar, yang bisa dipertahankan hanya 9000 hektar. Sisanya itu kita wanti-wakti untuk jalan. Setiap penyuluhan selalu kita sampaikan bahwa peruntukan sawah ini memang harus kita pertahankan, jangan sampai hilang, kecuali di Kecamatan Johan Pahlawan dan Kecamatan Mereubo memang lebih ke pemukiman, dan kita tidak mengatur sampai sejauh ini, mengingat dua kecamatan itu adalah kawasan padat penduduk. Sebagian masyarakat menganggap itu lahan hak mereka, tapi pemerintah juga menginginkan lahan ini tetap ada” (wawancara, 08 Agustus 2023).*

Sebagai upaya dalam menghindari ketidakpastian akan resiko dalam upaya mempertahankan lahan pertanian sawah, Informan 5 yang merupakan salah Koordinator Penyuluh dalam wawancara menyampaikan:

*“kadang kita memang harus lebih aktif bukan hanya dalam memberikan pelatihan atau penyuluhan kepada masyarakat, tapi juga harus turun lapangan untuk melihat langsung setiap proses yang dilalui oleh para petani. Karena terkadang ilmu yang kita pelajari dan kita sampaikan kepada petani tidak sinkron untuk diaplikasikan karena beberapa hal yang ditemukan di lapangan tidak memungkinkan untuk diterapkan. Jadi tidak hanya sebatas teori aja, tapi juga kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sesuatu yang kita sampaikan dapat diaplikasikan dengan baik dan sesuai” (Wawancara, 14 September 2023).*

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya komunikasi penyuluh menjadi hal yang penting untuk memberikan edukasi secara teoritis dan praktis kepada petani, sehingga petani merasakan manfaat secara langsung dari penyuluhan dan keterlibatan penyuluh di lapangan untuk melihat dan mengamati secara langsung apa yang menjadi permasalahan-permasalahan yang biasa dihadapi oleh petani, sehingga nantinya dapat memberikan alternatif solusi dari permasalahan tersebut.

Terkait dengan regulasi penertiban lahan pertanian pangan oleh pemerintah, dan keterlibatan penyuluh secara teoritis-praktis, informan 7 yang merupakan petani di salah satu desa kecamatan Bubon menyampaikan:

*“Kita memang pernah mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan dari penyuluh atau pemerintah. Seperti contoh, lahan kita ini harus dipermanenkan sebagai lahan pertanian sawah misalnya. Tapi balik lagi, apa sih yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk menjamin kesejahteraan kita, misalnya apakah dengan memberikan subsidi pupuk, atau peminjaman alat untuk memanen padi, kalau pemerintah bisa menjamin itu. Tidak masalah. Tapi jika tidak, kita juga tidak bisa menjanjikan apa-apa, ibaratnya seperti itu, makanya kalau pun kita dibuatkan aturan untuk mengatur itu, harus kita lihat-lihat lagi isinya, jangan sampai nanti kita malah dirugikan”* (wawancara, 19 Agustus 2023).

Dalam hal ini, regulasi yang dibuat dalam rangka menertibkan lahan dan memberikan pedoman kepada petani dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan, terdapat harapan-harapan yang selayaknya dapat diwujudkan dari implementasi qanun tersebut. artinya, substansi dari qanun tersebut tidak merugikan pihak manapun, baik pemerintah maupun petani.

### ***Convergence***

*Convergence* menyangkut dengan pemusatan kepentingan. Dalam hal ini penyuluh akan mempertimbangkan kelompok prioritas yang menjadi fokus utama sebuah program maupun pemberdayaan. Dalam upaya pemusatan kelompok prioritas, ada kelompok-kelompok yang menjadi target sasaran dari sebuah program pengembangan pertanian. Adapun kelompok prioritas yang menjadi tujuan dari program tersebut salah satunya adalah kelompok tani. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Informan 3, yang merupakan Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat dalam wawancara menyampaikan:

*“Sosialisasi atau penyuluhan yang kita fokuskan itu adalah kelompok tani secara umum yang berjumlah 561 kelompok yang tersebar di seluruh desa di Kabupaten Aceh Barat, dan spesifiknya lagi yang memiliki lahan pertanian lebih luas dibandingkan dengan Kawasan lain. jadi yang menjadi objek penyuluhan itu kelompok taninya, bukan person atau petaninya. Jadi harapannya, semua petani itu terhimpun dalam kelompok tani. Selanjutnya, kita juga berharap kelompok tani yang sudah dibentuk oleh setiap desa dapat bekerja maksimal dan lebih aktif, sehingga apa yang kita sampaikan dan apa yang menjadi permasalahan di lapangan dapat dikomunikasikan ke kita untuk bersama-sama mencari solusi, sehingga permasalahan tersebut tidak berlarut dan berdampak pada kerugian yang dialami oleh petani”* (wawancara, 09 Agustus 2023).

Terkait dengan kelompok tani yang menjadi kelompok prioritas dalam pengembangan tanaman padi, informan 6 yang merupakan anggota PERHIPTANI kabupaten aceh Barat, dalam wawancara menyampaikan:

*“kita punya 561 kelompok tanaman pangan yang tersebut di 12 kecamatan. Itu tentu jumlah yang sangat banyak. Dan dengan jumlah segitu harusnya dapat memberikan kontribusi positif kepada petani jika semua kelompok dapat bekerja dengan maksimal. Apalagi kelompok tani ini kan menjadi objek penyuluhan dari pemerintah, namun yang menjadi*

*permasalahan saat ini adalah, banyak kelompok tani yang vakum dan tidak aktif. Kalau aktif semua, saya rasa petani kita bisa menjadi petani yang mandiri dan sejahtera” (wawancara, 10 September 2023).*

### **Respect**

*Respect* dipahami bahwa terciptanya rasa saling mengerti, saling memahami dan saling menghargai antara pemberi pesan (pemerintah dan penyuluh) dengan penerima pesan (masyarakat tani), menciptakan ikatan emosional sehingga memudahkan dalam upaya pengembangan dari setiap kegiatan.

Pemerintah dibawah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat yang memiliki tupoksi dalam pengembangan pertanian termasuk tanaman pangan di Aceh Barat telah melakukan berbagai upaya pendekatan secara persuasif dengan petani melalui kelompok tani dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga lahan untuk tetap dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tani di desa-desa, hal ini seperti yang disampaikan oleh Informan 3, yang merupakan Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat dalam wawancara menyampaikan:

*“Memang tidak bisa kita pungkiri, kadang tanaman sawit justru lebih menjanjikan dibandingkan dengan padi. Namun, setidaknya dengan menanam padi, petani tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli beras, apalagi harga beras saat ini sangat mahal, biasa 15 kilo bisa dibeli dengan harga 170 ribu, sekarang harganya sudah 220 ribu, dan tentu semakin hari harganya akan semakin naik. Meskipun tidak memberikan untung besar saat panen, setidaknya petani punya stok beras yang dihasilkan dari menanam padi. Hal itu yang terus kita sampaikan kepada petani, dan saya lihat petani lebih mudah menerima dibandingkan kita meminta mereka untuk menanam padi demi menjaga lahan pertanian dari peralihan. Jadi sebisanya kita menyampaikan sesuatu yang sesuatu itu dapat menguntungkan mereka, bukan hanya pemerintah” (wawancara, 09 Agustus 2023).*

Menyikapi hal itu, informan 7 yang merupakan salah satu petani di kecamatan Bubon dalam wawancara menyampaikan:

*“kadang sosialisasi yang kita dapatkan itu arahnya seperti kita harus mengikuti kebijakan pemerintah, tanpa peduli dengan kesejahteraan kita sebagai petani. Dari pemerintah maupun penyuluh harusnya bisa memberikan sesuatu atau solusi lah dari setiap permasalahan yang kita temui saat bertani, misalnya dengan penertiban harga pupuk yang semakin mahal dan tentu itu memberatkan kita, belum lagi sawah kita kekurangan air sehingga tanamannya jadi rusak, hasil panen menurun. Jadi kita punya harapan besar kepada pemerintah, untuk memprioritaskan juga pada kesejahteraan petani, jadi saling menguntungkan” (wawancara, 19 Agustus 2023).*

Dari kedua pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap program maupun kebijakan pemerintah dalam upaya pengembangan tanaman pangan padi harus dapat memprioritaskan pada kebutuhan dari petani sehingga pemerintah dapat memberikan solusi dari program pengembangan maupun pemberdayaan tersebut. hal itu bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi petani padi untuk mempertahankan lahannya tetap menjadi lahan pertanian dan tidak beralih fungsi.

### ***Mutual Agreement***

Adanya kesamaan tujuan tentunya akan meningkatkan performa yang baik dari penyuluh dan semangat yang tinggi dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap program pengembangan yang diadakan. Program pengembangan idealnya bersifat bottom-up atau dari bawah ke atas. Artinya, pengembangan dilakukan berdasarkan kebutuhan petani dalam mencapai taraf hidup yang lebih baik. Sehingga tujuan akhir dari pengembangan tanaman pangan dapat dicapai dengan maksimal.

Kesamaan tujuan antara pemerintah, penyuluh dan petani dalam mewujudkan peningkatan hasil panen tanaman padi dapat dicapai apabila semua pihak pemangku kepentingan dapat bekerjasama dengan baik, melakukan koordinasi dengan intens dan selalu mengupayakan pengembangan yang berorientasi pada kesejahteraan petani. Hal ini juga disampaikan langsung oleh Informan 4, kepala bidang tanaman pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat:

*“Program pengembangan yang kita lakukan selama ini tidak jauh-jauh dari sesuatu yang memang dibutuhkan oleh petani. Hal itu bertujuan agar program pengembangan itu tidak sia-sia, ada manfaat yang dirasakan langsung oleh petani kita. Misalnya, dalam era digitalisasi seperti sekarang ini, teknologi geospasial dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam mengumpulkan dan menganalisis data pertanian, sehingga data geospasial dapat memberikan informasi yang sangat detail tentang kondisi lahan dan tanaman, sehingga dapat membantu petani dan lembaga pertanian dalam membuat keputusan yang lebih baik dalam hal pengelolaan pertanian” (wawancara, 12 September 2023).*

Dalam hal ini pemerintah berupaya melakukan pengawasan pengelolaan lahan sehingga dapat mengurangi resiko yang akan dihadapi oleh petani. Bentuk upaya lain adalah dengan memberikan fasilitas, baik dari alat-alat pertanian berteknologi hingga penyediaan pupuk subsidi. Namun, beberapa dari petani menyampaikan kekecewaannya terkait dengan perolehan pupuk subsidi yang cenderung sulit untuk didapatkan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Informan 10, yaitu salah satu Keujrun Blang di Kecamatan Samatiga, dalam wawancara ia menyampaikan:

*“Banyak keluhan dari petani yang menyampaikan ke saya terkait dengan pupuk subsidi. Pemerintah memang menyediakan itu, tapi untuk didapatkan oleh petani sangat sulit dan menjadi barang yang langka. Ujung-ujungnya petani beli pupuk non subsidi, dan itu harganya mahal. Keluhan-keluhan yang seperti ini sudah sangat sering saya dengar. Kita mencurigai mungkin ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan penyelundupan pupuk subsidi, jadi kita harap pemerintah dapat mengontrol itu dengan baik sehingga pupuk subsidi yang diperuntukkan kepada petani tepat sasaran dan bisa diperoleh oleh petani secara menyeluruh” (wawancara, 20 September 2023).*

### **Collective Action**

Adanya tindakan secara bersama-sama dalam mengimplementasikan setiap wacana yang telah ditetapkan menjadi hal penting dalam mewujudkan pengembangan tanaman pangan di kabupaten Aceh Barat. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat yang merupakan otoritas dalam pengembangan pertanian bekerjasama dengan berbagai stakeholder, termasuk masyarakat. Program pengembangan maupun pemberdayaan biasanya bersifat top-down yaitu dari atas ke bawah, artinya dari pemerintah ke masyarakat. Dalam upaya pengembangan tanaman pangan padi ini berupaya mengikutsertakan masyarakat untuk bersama-sama menjadi bagian dari setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Lebih dari itu, petani tidak hanya menjadi objek namun dapat berganti peran menjadi subjek atau inisiator dari program pengembangan tanaman pangan tersebut.

Harapan ini seperti yang disampaikan oleh informan 1, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat dalam wawancara menyampaikan:

*“Untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal dari setiap program pengembangan tanaman pangan, kita harus saling bahu membahu dan bekerja sama. Artinya, pemerintah tidak bekerja sendiri, kita membutuhkan dukungan dan peran dari segala pihak terkait termasuk kelompok tani dan petani sendiri. Misalnya kita dari pihak pemerintah memberikan fasilitas pertanian seperti irigasi, traktor dan lain-lain. harapannya itu dapat dimanfaatkan dengan baik dan kelompok tani dapat menjadi fasilitator dalam menjaga dan memelihara fasilitas tersebut agar digunakan dalam waktu jangka panjang” (wawancara, 08 Agustus 2023).*

Dari pernyataan di atas, mengidentifikasi bahwa pemerintah berupaya melibatkan kelompok tani dalam pemanfaatan sarana dan prasarana yang disediakan. Hal itu bertujuan agar fasilitas tersebut dalam memberikan secara maksimal dan dapat digunakan dalam waktu jangka panjang. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk koordinasi dan pelaporan secara berkala oleh kelompok tani kepada pemerintah. Hal senada juga disampaikan oleh informan 9 yang merupakan salah satu kelompok tani, dalam wawancara secara terpisah, ia menyampaikan:

“Kita memiliki tanggung jawab dalam menjaga sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Hal itu juga terus kita sampaikan secara langsung kepada petani untuk menggunakan fasilitas tersebut dengan baik. Biasanya kita terus memantau penggunaan fasilitas tersebut, jika ada kerusakan yang tidak bisa diperbaiki, biasanya kita akan melaporkan ke dinas untuk ditindak lanjuti, sehingga alat tersebut dapat dimanfaatkan kembali” (wawancara, 23 September 2023).

### ***Network of Relationship***

*Network of Relationship* berupaya menciptakan hubungan sosial yang baik antara penyuluh dengan masyarakat, sehingga akan berdampak pada keharmonisan dari proses interaksi yang berlangsung (Monge, et.al., 2003). Komunikasi yang efektif dapat dicapai apabila komunikan (penerima pesan) dapat memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator. Dalam memberikan pemahaman yang baik, maka diperlukan untuk menciptakan hubungan yang baik pula. Dalam upaya pengembangan tanaman pangan padi di kabupaten Aceh Barat, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat selaku implementor juga melakukan pendekatan secara persuasive dengan kelompok tani agar pesan-pesan atau informasi yang disampaikan dapat diterima dan diimplementasikan sesuai dengan harapan.

Dalam wawancara, Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat menyampaikan:

*“Memberikan penyuluhan tentu bukan hal yang mudah untuk dilakukan apalagi kita dihadapkan dengan masyarakat yang beragam latar belakang. Sebelum melakukan penyuluhan, biasanya kita mempelajari dulu habit dari masyarakat tani, termasuk dalam penggunaan bahasa yang biasa digunakan, sebisa mungkin kita akan menyesuaikan dengan lingkungan yang menjadi tempat penyuluhan. Hal itu dilakukan agar pesan yang kita sampaikan dapat dipahami dengan baik, tidak adanya miss komunikasi, sehingga tujuan dari penyuluhan bisa kita capai dengan maksimal” (wawancara, 09 Agustus 2023).*

Dalam upaya melakukan pendekatan dengan masyarakat tani, terkadang juga dihadapkan dengan beberapa kendala, seperti adanya anggapan bahwa penyuluhan tidak akan memberikan dampak apapun kepada petani, sehingga mengakibatkan pada rendahnya keterlibatan masyarakat tani untuk menjadi bagian dari kegiatan penyuluhan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh informan 8 yang merupakan petani di Kecamatan Sama Tiga saat wawancara ia menyampaikan:

*“Kita sebenarnya membutuhkan sesuatu yang tidak hanya sekedar penyuluhan atau sosialisasi, tapi lebih ke tindakan nyata. Kalau hanya sekedar informasi, kita juga bisa baca di internet. Yang mau inginkan itu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah termasuk*

*penyuluh untuk membantu kita dalam meningkatkan hasil panen, atau setidaknya mengurangi resiko biar tidak rugi ketika panen. Karena terkadang, ilmu yang disampaikan saat penyuluhan ketika di lapangan itu sudah berbeda, tidak bisa dipakai juga, jadi sama saja” (wawancara, 19 Agustus 2023).*

Menyikapi hal ini, informan 6 yang merupakan anggota PERHIPTANI kabupaten aceh Barat dalam wawancara juga menyampaikan:

*“Memang ada beberapa hal yang harus kita benahi dalam upaya melibatkan masyarakat tani untuk ikut andil dalam setiap program pengembangan yang dilaksanakan oleh pemerintah, termasuk dalam memberikan pelatihan atau penyuluhan. Tantangannya sekarang adalah Sebagian petani menganggap bahwa penyuluhan ini tidak akan memberikan manfaat, makanya kita berupaya untuk meyakinkan mereka bahwa kita dapat memberikan sesuatu dengan edukasi untuk membantu para petani dalam meningkatkan hasil panen, atau setidaknya petani tidak gagal panen. Pendekatan-pendekatan seperti itu lah yang terus kita lakukan, dan tentu itu tidak mudah, tapi kita memiliki keyakinan yang besar bahwa suatu saat masyarakat tani dapat teredukasi dengan baik sehingga kita nantinya dapat menjadi salah satu alternatif solusi dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi” (wawancara, 10 September 2023).*

## **KESIMPULAN**

Manajemen sumber daya komunikasi menjadi hal penting dalam pengelolaan program pengembangan tanaman pangan di Kabupaten Aceh Barat. Adapun beberapa upaya manajemen sumber daya komunikasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat selaku implementor dalam program pengembangan pertanian diantaranya adalah melakukan perencanaan program sesuai dengan kebutuhan petani dalam meningkatkan hasil panen tanaman padi, seperti dengan memprioritaskan pada pelatihan-pelatihan kelompok tani. Selanjutnya dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan keahlian dan bidang kerja, hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi program pengembangan dilakukan secara langsung, baik dengan pelatihan maupun sosialisasi yang diperuntukkan pada kelompok tani, namun keterlibatan dan partisipasi kelompok tani masih tergolong rendah sehingga pesan atau informasi yang ingin disampaikan tidak mampu menjangkau target sasaran secara keseluruhan.

Terkait dengan praktik alih fungsi lahan yang semakin masif, pemerintah melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat telah membuat rancangan Qanun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang bertujuan untuk menertibkan lahan pertanian dari praktik peralihan menjadi nonpertanian. Rancangan qanun ini juga bertujuan untuk menjamin

kesejahteraan petani padi sehingga praktik peralihan dapat diminimalisir. Dalam implementasi program pengembangan tanaman pangan khususnya padi pemerintah juga dihadapkan dengan beberapa kendala, diantaranya adalah adanya anggapan dari petani bahwa penyuluhan bersifat teoritis dan tidak mampu menjawab persoalan praktis yang terjadi di lapangan, hal ini berdampak pada rendahnya keterlibatan petani dari setiap program pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, kendala lain juga menyangkut dengan masih adanya anggapan masyarakat bahwa tanaman pangan tidak menjamin kesejahteraan petani.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada LPPM-PMP Universitas Teuku Umar Meulaboh selaku penyumbang dana kegiatan penelitian melalui Hibah Internal Penelitian Asisten Ahli sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan terutama kepada pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat dan informan-informan lainnya yang telah bekerjasama dengan baik dan kooperatif, sehingga memudahkan penulis dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara komprehensif sehingga dapat menjawab permasalahan yang menjadi tujuan dari penelitian ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adib, A., & Orji, R. (2021). A Systematic Review of Persuasive Strategies in Mobile E-Commerce Applications and Their Implementations. *International Conference on Persuasive Technology*, 217–230.
- Alemu, A. E., Maetens, M., Deckers, J., Bauer, H., & Mathijs, E. (2016). Impact of supply chain coordination on honey farmers' income in Tigray, Northern Ethiopia. *Journal of Agricultural and Food Economics*, 4(9):1-21.
- Bahua, M. I. (2018). Peran Kompetensi Penyuluh Pertanian pada Keterampilan Petani Bawang Merah. *Agriekonomika*, 7(2): 112–119.
- Berg, Bruce L. (2001). *Qualitative Research Methods for The Social Sciences*. Needham: Allyn & Bacon.
- Bernadette D. N., Ismi D. A. N., & Andre, N. R. (2020). Symbolic Convergence and Community Based Tourism. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(7): 575-587
- Bonye, S. Z., Alfred, K. B., & Jasaw, G. S. (2012). Promoting community-based extension agents as an alternative approach to formal agricultural extension service delivery in Northern Ghana. *Asian Journal of Agric. Rural Dev*, 2(1):76–95.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.

- Darmin, dkk. (2016). *Model Komunikasi Dalam Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Muna Barat*. Universitas Halu Uleo.
- Devi, dkk. (2015). *Pembangunan Pertanian Indonesia*. Jakarta: Departemen RI.
- DPR RI. (2022). Salim Fakhri Harapkan Ada Kemajuan Sektor Pertanian di Aceh. Tersedia pada: <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41340/t/Salim+Fakhri+Harapkan+Ada+Kemajuan+Sektor+Pertanian+di+Aceh> (diakses pada 04 Juli 2023).
- Gunawan., & Yoyo Haryanto. (2020). Tingkat Adopsi Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Sawah. *Jurnal Kommunity Online*, 1 (2):111-122.
- Jenkins, H. (2006). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York University Press.
- Kincaid, L. (1979). *The Convergence Model of Communication*. Hawaii: East West Center.
- Leeuwis, C. (2004). *Communication for Rural Innovation (Rethinking Agricultural Extension)*. Victoria (AUS): Blackwell Publishing.
- Monge, Peter R., & Contractor, Noshir S. (2003). *Theories of Communication Networks*. New York: Oxford University Press.
- Nurmayasari, I., Viantimala, B., Gultom, D. T., Yanfika, H., & Mutolib, A. (2020). Partisipasi dan Kepuasan Petani Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian di Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan. *Mimbar Agribisnis*, 6(1): 448–459.
- Pertanian.go.id. (2022). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Tersedia pada: [https://tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document/LAKIN%20DJTP%202022\\_UPDATE%20ATAP%20\(2\).pdf](https://tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document/LAKIN%20DJTP%202022_UPDATE%20ATAP%20(2).pdf) (diakses pada 02 Juli 2023)
- Peter Boxall, John Purcell., & Patrick Wright. (2017). *The Oxford Handbook of Human Resource Management*. UK: Oxford University Press, 1.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Saefudin, N. K. (2016). *Efektivitas Komunikasi Penyuluhan Pertanian di Tingkat Kelompok Tani Desa Margahayu Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat*. Institut Pertanian Bogor.
- Silalahi, U. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama.